

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini kebutuhan manusia tak hanya soal kebutuhan sandang, pangan dan papan, tetapi lebih dari itu kebutuhan akan suatu informasi menjadi salah satu hal yang cukup penting di era modern ini [1]. Kebutuhan informasi masyarakat semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga perilaku pencarian informasi kini dijadikan tingkah laku hidup masyarakat modern agar selalu memperbarui informasi terkini. Kebutuhan informasi merupakan suatu keadaan dimana adanya perbedaan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang dibutuhkan. Masyarakat akan berupaya mencari atau mendatangi sumber-sumber informasi seperti, *website*, perpustakaan, pusat data dan informasi, museum dan lain-lain.

Perkembangan teknologi informasi dirasakan sangat cepat dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan profesi yang menyebabkan adanya perubahan sistem pada berbagai instansi, termasuk instansi pemerintah. Salah satu bagian dari teknologi informasi adalah adanya internet yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Internet sebagai bagian dari teknologi informasi mengubah bentuk masyarakat lokal menjadi masyarakat global, serta memunculkan sebuah dunia transparan akan perkembangan informasi [2]. Internet menyajikan informasi dengan berbagai macam layanan seperti WWW (*World Wide Web*), FTP (*File Transfer Protocol*), *Discussion Group* dan masih banyak lagi. Pada penelitian ini, akan membahas salah satu media layanan informasi *World Wide Website* yaitu *Website*. Peneliti akan menguji kualitas jaringan dalam pengaksesan *website* DPRD Kab. Pematang, untuk mengetahui seberapa baik *website* tersebut bekerja dengan menggunakan parameter QoS (*Quality of Service*). Asal usul *website* tersebut dipilih dikarenakan masih berhubungan dengan tempat peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

## 1.2 TUJUAN

1. Mengetahui kinerja QoS dalam pengaksesan *website* menggunakan provider Indosat dan Indihome.
2. Mendapatkan hasil nilai dan indeks dari pengujian parameter QoS seperti *throughput*, *delay* dan *packet loss* menggunakan *software wireshark*.
3. Mendapatkan hasil QoS menurut Standar THIPHON.

## 1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan PKL/KP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal 15 agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 september 2022. Pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan penulis, ditempatkan di bagian hubungan masyarakat (humas).

## 1.4 ASPEK UMUM KELEMBAGAAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah[3].

### A. Visi DPRD Kabupaten Pemalang:

Terwujudnya KABUPATEN PEMALANG AMAN yang “ADIL, MAKMUR, AGAMIS dan NGANGENI” [4].

### B. Misi DPRD Kabupaten Pemalang Masa Bhakti 2019-2024

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2024, dirumuskan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan rasa Aman, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;

2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
  3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
  4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
  5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal;
  6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan[5].
- Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
    1. Membentuk Perda bersama bupati;
    2. Membahas dan memberikan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
    3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
    4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
    5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
    6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
    7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
    9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan[6].

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG 2019-2024

Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang Periode 2019 – 2024

		
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang		
<b>TATANG KIRANA, S.IP</b>		
		
Wakil Ketua	Wakil Ketua	Wakil Ketua
<b>AJENG TRIYANI, A.Md</b>	<b>KHODORI, S.Ag</b>	<b>HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si</b>

Gambar 1.1 Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang 2019-2024[7]

### C. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

## **1.5 METODE PENULISAN LAPORAN**

Pada saat melakukan penyusunan laporan, penulis memperoleh data dan dasar teori menggunakan metode:

### **1. Metode Praktikum**

Metode ini dilakukan dengan melakukan praktik langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang dibimbing oleh pembimbing KP.

### **2. Studi Keputusan**

Metode ini dilakukan dengan membaca, mengamati dan memahami sumber tertulis, sehingga mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan membantu dalam melakukan proses penyusunan laporan ini.

### **3. Dokumentasi**

Metode ini dilakukan dengan mencatat data yang diperlukan dalam penulisan laporan, seperti struktur organisasi, tugas dan wewenang, dan data lain yang berhubungan dengan kegiatan kerja praktik.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN**

Guna untuk mempermudah pemahaman mengenai laporan, maka laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang dalam pengambilan judul laporan yang mencakup tujuan, penjelasan ruang lingkup pekerjaan, penjelasan tentang aspek umum kelembagaan, penjelasan mengenai metode penulisan laporan yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II DASAR TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan hal teknis pekerjaan. Dasar teori ini digunakan sebagai landasan dalam penulisan laporan.

### **BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang pekerjaan/kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan PKL/KP. Bagian ini memuat uraian pekerjaan secara umum dan

spesifik tentang manajemen di perusahaan serta uraian pekerjaan yang spesifik tentang pengembangan sistem yang dilakukan. Setelah itu hasil dari pekerjaan, dianalisis dari mulai konsep pekerjaan hingga *output* yang dihasilkan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan serta saran yang disampaikan bagi pembaca dan tempat PKL/KP.